



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PEMANFAATAN TIK DALAM PENANGANAN PERKARA PHPU 2019

DISAMPAIKAN DALAM ACARA BIMBINGAN TEKNIS PENYELESAIAN

PERKARA PHPU 2019

Oleh;

Heru Setiawan

Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI

- 1 **Persiapan dan Login Partai Politik**
- 2 **Permohonan PPHU Anggota DPR/DPRD Tahun 2019**
- 3 **Keterangan Pihak Terkait Anggota DPR/DPRD Tahun 2019**
- 4 **Tempat Duduk Sidang**
- 5 **Case Retrieval dan Tracking Perkara**
- 6 **Pelayanan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*);**



PENDAHULUAN

“ UU NO.7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM (pasal 466)
“Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antara Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota”

UU NO.7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM pasal 474 ayat 1
“Dalam Hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi”

UU NO.7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM pasal 475 ayat 1
“Dalam Hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU”

”

PENDAHULUAN

“

Pemanfaatan Teknologi Informasi & Komunikasi di Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu upaya nyata untuk memberikan kemudahan bagi Para Pihak Yang Berperkara di MK sebagai perwujudan administrasi lembaga peradilan yang modern dan terpercaya.

Dasar hukum pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Mahkamah dalam penanganan perkara konstitusi sesuai kewenangannya:

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 (PMK 18/2009) tentang “Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (Electronic Filing) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference)”

”

PERMOHONAN ELEKTRONIK

“

Permohonan dapat disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi melalui media elektronik (Permohonan Elektronik / Electronic Filing), dan permohonan elektronik tersebut dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (2)

“Permohonan elektronik (electronic filing), selanjutnya disebut permohonan, adalah permohonan melalui media elektronik yang memungkinkan pemohon untuk mengirim dan menyampaikan permohonannya secara elektronik kepada Mahkamah”

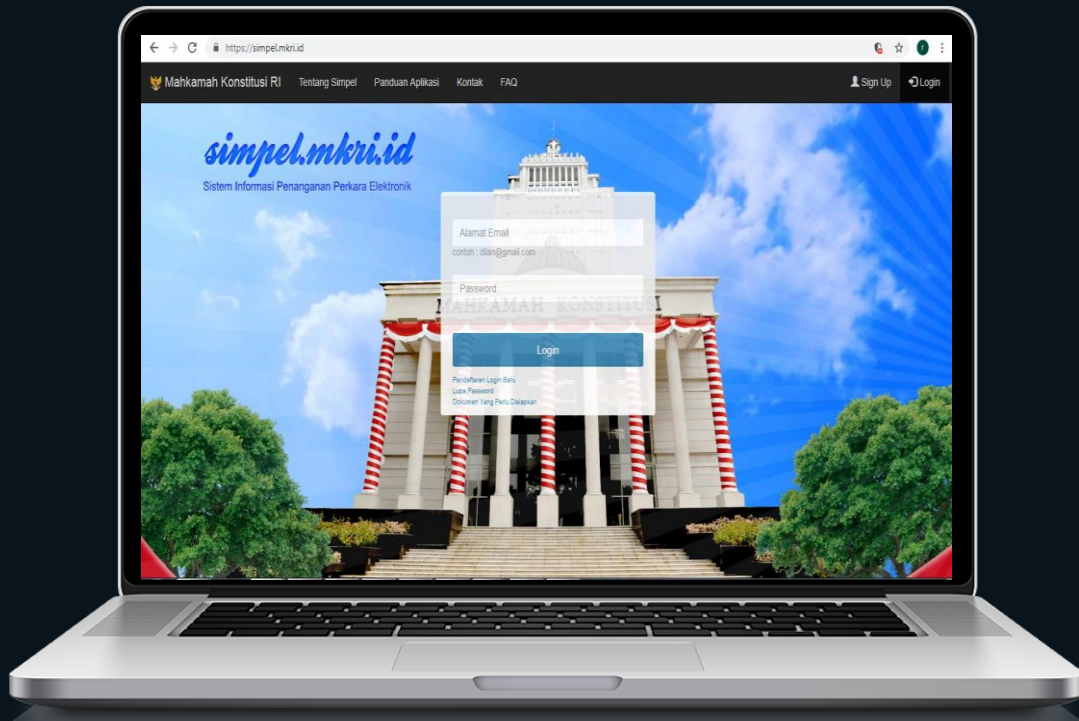
PMK 18/2009 Pasal 9 ayat (3)

“Permohonan dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.”

”

SIMPEL

(SISTEM INFORMASI PENANGANAN PERKARA ONLINE)



SIMPEL merupakan media elektronik berupa sebuah Sistem Informasi Manajemen untuk penerimaan permohonan secara elektronik.

SIMPEL memberikan akses langsung kepada para pihak terhadap perkara konstitusi, termasuk untuk mengajukan permohonan elektronik secara online (permohonan online).

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (14)

“Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik, selanjutnya disebut SIMPEL, adalah sistem informasi manajemen penerimaan permohonan perkara secara elektronik”



1. Persiapan dan Login Partai Politik ;

Kemudahan Berperkara di MK

- ✓ Pengajuan Permohonan Online
- ✓ Pengajuan Permohonan Offline/Hadir di MK, NUPP dan Pojok Digital

Persiapan Sebuah Permohonan Online

- ✓ Paket Internet
- ✓ Smartphone
- ✓ Camera Photo Smartphone
- ✓ E-Mail di smartphone
- ✓ Whatsapp Web
- ✓ Dekstop/Notebook
- ✓ Hotspot Selulair
- ✓ KTP
- ✓ Alamat Email
- ✓ Nomor HP
- ✓ Daftar Kuasa Hukum jika menggunakan kuasa
- ✓ Digitalisasi Materi Permohonan
- ✓ Dipersiapkan oleh DPP Partai Politik dan Dapat dibantu oleh seluruh DPD Partai Politik

Legal Standing DPP Partai Politik

- ✓ Pengajuan Permohonan Pemohon
- ✓ Pengajuan Permohonan Keterangan Pihak Terkait

Pentingnya Peran DPP Partai Politik dan DPD Partai Politik

- ✓ Dengan dibatasinya waktu pengajuan permohonan perkara di MK sangat penting mengelola hubungan kerja DPP Partai Politik dan DPD Partai Politik
- ✓ DPP Partai Politik adalah Pemilik Legal Standing Pengajuan Permohonan Perkara dan Pengajuan Keterangan Pihak Terkait
- ✓ DPD Partai Politik adalah bagian organ DPP Partai Politik yang memiliki data terkait dengan objek yang di sengkatakan oleh Para Pihak. Obyek yang disengkatakan yaitu keputusan KPU Provinsi, KPU Kabutapen/Kota

Pentingnya e-mail dan Nomor HP Para Pihak

Email Para Pihak akan senantiasa rutin mendapatkan Dokumen Administrasi Kepaniteraan dan Dokumen Hukum Mahkamah Konstitusi:

- ✓ Mendapatkan login untuk mengajukan permohonan online dan mendapatkan Tanda Terima Online
- ✓ Mendapatkan Dokumen Administrasi Kepaniteraan MK: Akta Pengajuan Permohonan Pemohon, Akta Permohonan Lengkap/Belum Lengkap, Akta Registrasi Perkara Konstitusi, Pemberitahuan Sidang Pertama, Penyampaian Jadwal Sidang, Penyampaian Salinan Permohonan, Penyampaian Jawaban Termohon, Penyampaian Keterangan Pihak Terkait, Penyampaian Salinan Putusan
- ✓ Seluruh dokumen produk MK telah menggunakan sertifikasi dan tanda tangan elektronik

Pentingnya Nomor HP Para Pihak

- ✓ Sebagai media komunikasi yang handal antara Juru Panggil MK dengan Para Pihak

Pentingnya Sempel

- ✓ Memberikan Kemudahan Para Pihak dalam mengajukan permohonan online di MK
- ✓ Menyimpan semua dokumen permohonan dan tanda terima permohonan
- ✓ Menyimpan tracking permohonan, jawaban termohon dan keterangan pihak terkait
- ✓ Media untuk mendaftarkan tempat duduk di ruang sidang dan plotting kehadiran para pihak di MK secara online
- ✓ Sempel senantiasa always on dan siap dientry kapanpun dan tidak pernah ada penolakan terkait waktu.

Sertifikasi Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik

- ✓ Pengganti tanda tangan basah yang valid dan sama nilainya dengan tanda tangan basah
- ✓ Tanda Tangan elektronik MK tersertifikasi langsung dengan BSSN (Badan Syber Sandi Negara)
- ✓ Dokumen Elektronik MK Otentik dan dapat diuji dengan smartphone dimanapun berada
- ✓ Tidak dapat dipalsukan walaupun penambahan ataupun pengurangan sebuah titik (.), koma (,) maupun spasi ()
- ✓ Pemberlakuan UU ITE Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Informasi dan Layanan Online MK lainnya

- Case Retrieval
- Case Tracking
- Hubungi MK
- Dewan Etik
- Email MK
- Telpon MK
- Konsultasi MK
- Jadwal Sidang MK
- Putusan MK
- Risalah MK
- Streaming dan Persidangan Jarak Jauh MK



2. Pengajuan Permohonan Online Calon Anggota DPR/DPRD

Pengajuan Permohonan Online Calon Anggota DPR/DPRD Melalui DPP Partai

DPP partai politik harus mendaftarkan pada SIMPEL untuk mendapatkan akun log in DPP Partai Politik. Langkah berikutnya DPP Parta Politik akan mengisi profile DPP Partai Politik

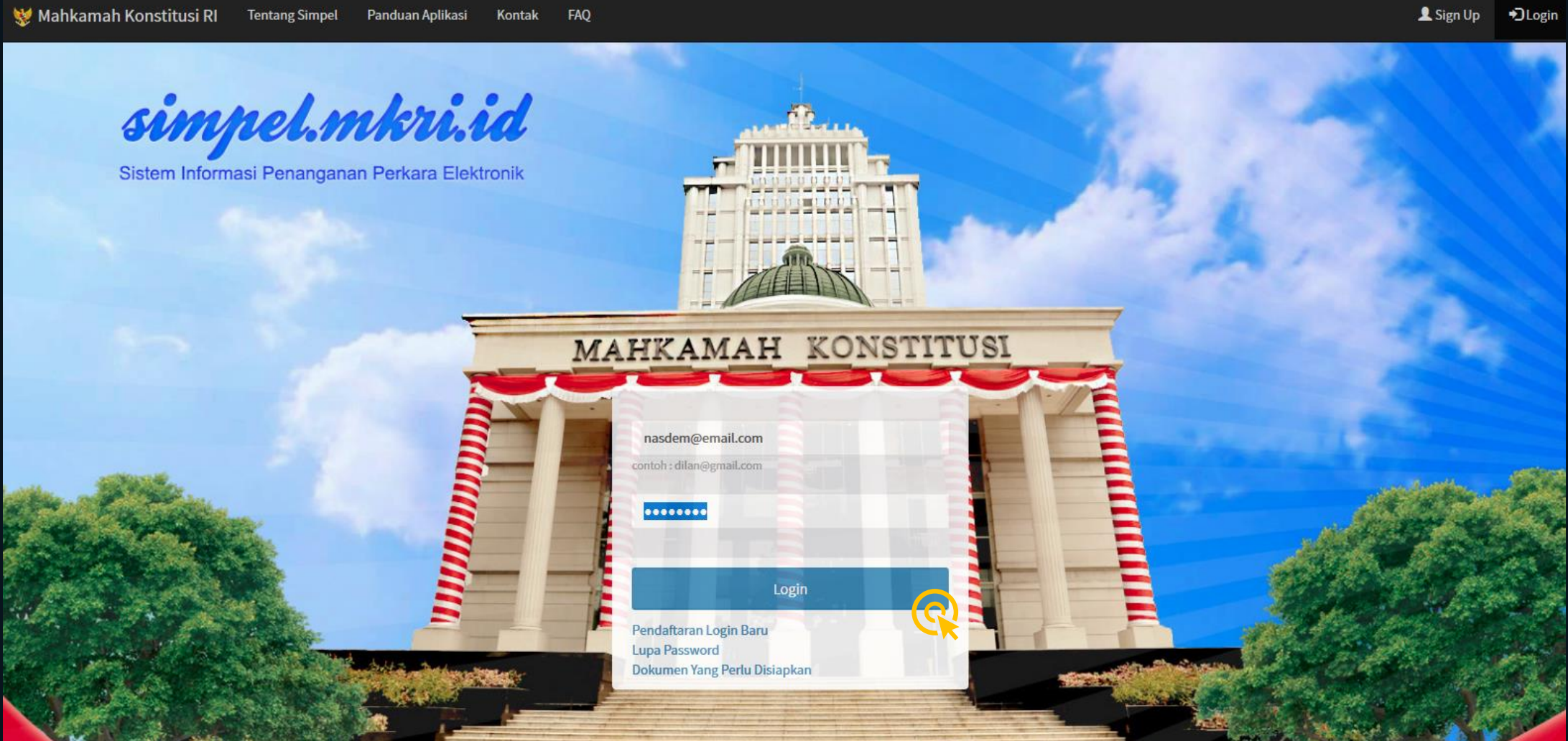
PMK Nomor 2 Tahun 2018 Pasal 8 ayat (1):

“Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) dapat dilakukan melalui Permohonan daring (online) paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon”

PMK Nomor 2 Tahun 2018 Pasal 8 ayat (2):

“Pemohon atau kuasa hukum menyerahkan Permohonan asli dalam jangka waktu pealing lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan”

Pengajuan Permohonan Online Calon Anggota DPR/DPRD Melalui DPP Partai



Login setelah daftar akun sebagai DPP Partai Politik

Pengajuan Permohonan Online Calon Anggota DPR/DPRD Melalui DPP Partai

The screenshot displays the SIMPEL web application interface. The top navigation bar includes the SIMPEL logo, a user profile for 'nasdem@email.com', and a breadcrumb trail: 'Dashboard > Pileg 2019 > Keterangan Pihak Terkait'. The main content area is titled 'List Perkara DPRD/DPRD' with a subtitle 'Perselisihan Pemilihan Legislatif DPRD/DPRD Tahun 2019'. Below this, there is a section for 'Permohonan Online' which contains a table with the following structure:

#	No Perkara	Permohonan	Aksi
---	------------	------------	------

The table is currently empty. The left sidebar contains a navigation menu with items: Dashboard, Pileg 2019 (with sub-items: Pengajuan Permohonan, Pengajuan Perorangan, Informasi Permohonan, Keterangan Pihak Terkait), Kunjungan Sidang, Informasi Perkara, Kuasa Hukum, and Bantuan. At the bottom of the sidebar, the date and time are displayed: 'Selasa, 16 Oktober 2018' and '14:07:53'.

Partai Politik setelah *log in* pada tampilan utama, dapat mendaftarkan pengajuan permohonan 34 provinsi, memilih kuasa hukum lebih dari 1;

Pengajuan Permohonan Online Calon Anggota DPR/DPRD Melalui DPP Partai

The screenshot shows the SIMPEL web application interface. The top navigation bar is blue and contains the SIMPEL logo, a user profile icon for 'pkb@email.com', and a hamburger menu icon. The left sidebar is dark grey and lists various navigation options: Dashboard, Pileg 2019 (with sub-items: Pengajuan Permohonan, Pengajuan Perorangan, Informasi Permohonan), Kunjungan Sidang, Informasi Perkara, Kuasa Hukum, Dewan Pimpinan Daerah, and Bantuan. The main content area has a white background and features the title 'Permohonan Online' followed by 'Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR/DPRD'. Below this, there is a breadcrumb trail: 'Dashboard > Pileg 2019 > List Permohonan'. The central focus is a large heading 'PERMOHONAN ONLINE PERKARA PEMILU LEGISLATIF'. Underneath the heading, a paragraph explains that the date and time of ticket creation are used for the application deadline, which is 1x24 hours from the time of creation. A blue button labeled 'Buat Tiket Pengajuan Permohonan' is prominently displayed with a yellow circular callout icon pointing to it.

Waktu pembuatan tiket adalah waktu yang dicatat dalam pengajuan permohonan (APPP). Pemohon dapat melengkapi permohonan dalam waktu 1 x 24 jam setelah pembuatan tiket. Tiket akan hilang secara

Pengajuan Permohonan Online Calon Anggota DPR/DPRD Melalui DPP Partai

SIMPEL nasdem@email.com Online

Permohonan Online Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR/DPRD

Dashboard > Pileg 2019 > List Permohonan > Pilih Provinsi

PILIH PROVINSI YANG BERSENGKETA

<input type="checkbox"/> Aceh	<input type="checkbox"/> Sumatera Utara (Sumut)	<input type="checkbox"/> Sumatera Barat (Sumbar)
<input checked="" type="checkbox"/> Riau	<input type="checkbox"/> Jambi	<input type="checkbox"/> Sumatera Selatan (Sumsel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kepulauan Bangka Belitung	<input type="checkbox"/> Bengkulu	<input type="checkbox"/> Lampung
<input type="checkbox"/> Kepulauan Riau	<input type="checkbox"/> Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI Jakarta)	<input type="checkbox"/> Jawa Barat (Jabar)
<input checked="" type="checkbox"/> Jawa Tengah (Jateng)	<input type="checkbox"/> Jawa Timur (Jatim)	<input type="checkbox"/> Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
<input type="checkbox"/> Banten	<input type="checkbox"/> Bali	<input type="checkbox"/> Nusa Tenggara Barat (NTB)
<input type="checkbox"/> Nusa Tenggara Timur (NTT)	<input type="checkbox"/> Kalimantan Barat (Kalbar)	<input type="checkbox"/> Kalimantan Tengah (Kalteng)
<input type="checkbox"/> Kalimantan Selatan (Kalsel)	<input type="checkbox"/> Kalimantan Timur (Kaltim)	<input type="checkbox"/> Kalimantan Utara (Kaltara)
<input type="checkbox"/> Sulawesi Utara (Sulut)	<input type="checkbox"/> Sulawesi Tengah (Sulteng)	<input type="checkbox"/> Sulawesi Selatan (Sulsel)
<input type="checkbox"/> Sulawesi Barat (Sulbar)	<input type="checkbox"/> Sulawesi Tenggara (Sultra)	<input type="checkbox"/> Gorontalo
<input type="checkbox"/> Maluku	<input type="checkbox"/> Maluku Utara (Malut)	<input type="checkbox"/> Papua
<input type="checkbox"/> Papua Barat		

Simpan

DPP Partai Politik memilih Provinsi yang menjadi objek perselisihan hasil pemilu

Pengajuan Permohonan Online Calon Anggota DPR/DPRD Melalui DPP Partai

SIMPEL nasdem@email.com Online

Permohonan Online Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR/DPRD

Dashboard > Pileg 2019 > List Permohonan

Tanggal Tiket 15-10-2018 pukul 22:54 WIB
Tiket berlaku sampai tanggal 16-10-2018 pukul 22:54 WIB

Anda harus melengkapi data permohonan per Provinsi sebelum masa berlaku tiket habis.

1. Kepulauan Bangka Belitung
2. Kepulauan Riau
3. Jawa Tengah (Jateng)

Tanggal Tiket 16-10-2018 pukul 14:00 WIB
Tiket berlaku sampai tanggal 17-10-2018 pukul 14:00 WIB

Anda harus melengkapi data permohonan per Provinsi sebelum masa berlaku tiket habis.

Selasa, 16 Oktober 2018
14:12:15

Contoh DPP Partai Politik telah memilih 3 Provinsi yang menjadi objek perselisihan hasil pemilu pada

15 Oktober 2018 pukul 22.54

Pengajuan Permohonan Online Calon Anggota DPR/DPRD Melalui DPP Partai

SIMPEL nasdem@email.com Online

Permohonan Online Perselisihan Pemilihan Legislatif DPR/DPRD Tahun 2019

Dashboard > Pileg 2019 > List Permohonan > Permohonan Online

Permohonan Online

Provinsi: Jawa Tengah (Jateng)

Menunjuk Kuasa: TIDAK

Pemohon

Partai Politik	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
Nama Ketua	Surya Paloh
Nama Sekjen	JOHNNY G. PLATE
Alamat	Jalan Jalan No 1
Email	nasdem@email.com
Nomor Telepon	
Nomor Handphone	08111111111

Permohonan

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif DPR,DPRD Provinsi Jawa Tengah Jateng Tahun 2019

[Simpan Sementara](#) [Selanjutnya](#)

DPP Partai Politik melengkapi isian aplikasi PHPU DPR/DPRD Tahun 2019

Pengajuan Permohonan Online Calon Anggota DPR/DPRD Melalui DPP Partai

SIMPEL nasdem@email.com Online

Dashboard | Pileg 2019 | Kunjungan Sidang | Informasi Perkara | Kuasa Hukum | Bantuan

Selasa, 16 Oktober 2018
14:27:47

Permohonan Online

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR/DPRD

Dashboard > Pileg 2019 > List Permohonan > Permohonan Online

PILIH DAERAH PEMILIHAN YANG BERSENGKETA

DAPIL ANGGOTA DPR

<input type="checkbox"/> Jateng I Partai Terkait	<input checked="" type="checkbox"/> Jateng II Partai Terkait	<input checked="" type="checkbox"/> Jateng III Partai Terkait
<input type="checkbox"/> Jateng IV Partai Terkait	<input type="checkbox"/> Jateng V Partai Terkait	<input type="checkbox"/> Jateng VI Partai Terkait
<input type="checkbox"/> Jateng VII Partai Terkait	<input type="checkbox"/> Jateng VIII Partai Terkait	<input type="checkbox"/> Jateng IX Partai Terkait
<input type="checkbox"/> Jateng X Partai Terkait		

DAPIL ANGGOTA DPRD

<input type="checkbox"/> Jawa Tengah 1 Partai Terkait	<input type="checkbox"/> Jawa Tengah 2 Partai Terkait	<input type="checkbox"/> Jawa Tengah 3 Partai Terkait
<input type="checkbox"/> Jawa Tengah 4 Partai Terkait	<input type="checkbox"/> Jawa Tengah 5 Partai Terkait	<input type="checkbox"/> Jawa Tengah 6 Partai Terkait
<input type="checkbox"/> Jawa Tengah 7 Partai Terkait	<input type="checkbox"/> Jawa Tengah 8 Partai Terkait	<input type="checkbox"/> Jawa Tengah 9 Partai Terkait
<input type="checkbox"/> Jawa Tengah 10 Partai Terkait	<input type="checkbox"/> Jawa Tengah 11 Partai Terkait	<input type="checkbox"/> Jawa Tengah 12 Partai Terkait
<input type="checkbox"/> Jawa Tengah 13 Partai Terkait		

DPP Partai Politik memilih pihak terkait sesuai dapil DPR/DPRD yang hendak diajukan permohonan

PHPU DPR/DPRD Tahun 2019

Pengajuan Permohonan Online Calon Anggota DPR/DPRD Melalui DPP Partai

The screenshot displays the SIMPEL web application interface. The top navigation bar includes the SIMPEL logo, a user profile for 'pkb@email.com', and a breadcrumb trail: 'Dashboard > Pileg 2019 > List Permohonan > Permohonan Online'. The main content area shows the 'Permohonan Online' page with the title 'Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR/DPRD'. A modal window titled 'Partai Politik Terkait - Google Chrome' is open, displaying the 'PILIH PARTAI POLITIK TERKAIT' form. The form contains a grid of 15 checkboxes, each with a party name: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) (checked), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), Partai Beringin Karya (Berkarya), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Hati Nurani (Hanura), Partai Demokrat, and Partai Bulan Bintang (PBB). At the bottom of the form are 'Tutup' and 'Simpan' buttons. The background dashboard shows a sidebar menu with items like 'Dashboard', 'Pileg 2019', 'Kunjungan Sidang', 'Informasi Perkara', 'Kuasa Hukum', 'Dewan Pimpinan Daerah', and 'Bantuan'. The date and time are 'Rabu, 26 September 2018 22:11:10'.

DPP Partai Politik melakukan pemilihan pihak terkait PHPU DPR/DPRD Tahun 2019

Pengajuan Permohonan Online Calon Anggota DPR/DPRD Melalui DPP Partai

The screenshot shows the SIMPEL web application interface. The top navigation bar includes the SIMPEL logo, a user profile for 'nasdem@email.com' (Online), and a user email 'nasdem@email.com'. The left sidebar contains a menu with items: Dashboard, Pileg 2019 (with sub-items: Pengajuan Permohonan, Pengajuan Perorangan, Informasi Permohonan, Keterangan Pihak Terkait), Kunjungan Sidang, Informasi Perkara, Kuasa Hukum, and Bantuan. The main content area is titled 'Upload Berkas Permohonan' and lists seven document types, each with a 'Telusuri...' button, a status 'Tidak ada berkas dipilih.', and an 'Upload' button. The document types and their respective file format and size requirements are:

- KTP Pemohon: *)File harus dengan ekstensi (.jpg/.png/.gif) dan Ukuran file maksimal : 1 MB
- Permohonan: *) File harus dengan ekstensi (.pdf) file maksimal : 3 MB
- Permohonan DOC: *) File harus dengan ekstensi (.doc) dan ukuran file maksimal : 3 MB
- Daftar Alat/Dokumen Bukti: *) File harus dengan ekstensi (.doc/.docx/.xls/.xlsx) dan ukuran file maksimal : 1 MB
- Alat/Dokumen Bukti: File harus dengan ekstensi (.doc/.docx/.xls/.xlsx) dan ukuran file maksimal : 3 MB
- Surat Keputusan Termohon: *) File harus dengan ekstensi (.pdf) dan ukuran file maksimal : 5 MB
- Surat Persetujuan Partai: *) File harus dengan ekstensi (.pdf) dan ukuran file maksimal : 3 MB

At the bottom of the main content area, there is a row of icons representing the document types: KTP Pemohon, Permohonan, Permohonan, Daftar Alat Bukti, Alat Bukti, SK Termohon, and Surat Persetujuan Partai. Below this row are buttons for 'Kembali', 'Simpan Sementara', and 'Kirim Permohonan'. The date and time are displayed as 'Selasa, 16 Oktober 2018 13:42:32'.

Setelah berhasil
upload Berkas
Permohonan

Partai Politik melakukan proses upload/unggah berkas permohonan PPHU DPR/DPRD Tahun 2019

Pengajuan Permohonan Online Calon Anggota DPR/DPRD Melalui DPP Partai

SIMPEL nasdem@email.com Online

Dashboard

Pileg 2019

- Pengajuan Permohonan
- Pengajuan Perorangan
- Informasi Permohonan
- Keterangan Pihak Terkait

Kunjungan Sidang

Informasi Perkara

Kuasa Hukum

Bantuan

Selasa, 16 Oktober 2018
13:43:03

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id


TANDA TERIMA PERMOHONAN ONLINE
Nomor Online : 3/PAN.ONLINE/DPR-DPRD/2019

Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif DPR,DPRD Provinsi Jawa Tengah Jateng Tahun 2019

Pemohon : Partai Nasional Demokrat Nasdem

Kuasa Pemohon :

Tanggal : 15 Oktober 2018 Pukul : 22:54 WIB



NO.	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA
1	Permohonan	ADA
2	KTP Pemohon	ADA
3	Keputusan Termohon	ADA
4	Daftar Alat/Dokumen Bukti	ADA
5	Alat/Dokumen Bukti	ADA
6	Surat Referensi Partai	ADA
7	Surat Kuasa	TIDAK ADA
8	KTP Kuasa	TIDAK ADA

Panitera: TTD, Kasianur Sidauruk

Pemohon: Partai Nasional Demokrat Nasdem

Catatan :
1. Tanda terima permohonan online ini bukan bukti bahwa permohonan telah diregistrasi.
2. Pemohon dapat melengkapi berkas permohonan dengan menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan masing-masing 4 rangkap agar dapat diperiksa syarat kelengkapannya.
3. Apabila yang menyerahkan bukan pemohon atau kuasa hukumnya harus ada surat kuasa untuk menyerahkan berkas.

DPP Partai Politik mendapatkan tanda terima online permohonan PHPU DPR/DPRD Tahun 2019



3. Keterangan Pihak Terkait Anggota DPR/DPRD Tahun 2019

Keterangan Pihak Terkait Anggota DPR/DPRD Tahun 2019

The screenshot shows the SIMPEL web application interface. On the left is a dark sidebar with a navigation menu. The main content area is titled 'List Perkara DPRD/DPRD' and contains a table of cases. A red circle highlights the 'Keterangan Pihak Terkait' menu item in the sidebar, with a red line pointing to the text 'Pilih menu Keterangan Pihak Terkait' on the far left. Another red circle highlights the 'Daftar Sebagai Pihak Terkait' link in the table's 'Aksi' column, with a red line pointing to the text 'Tampilan dashboard daftar sebagai pihak terkait' at the bottom of the image.

SIMPEL
golkar@email.com
Online

Dashboard
Pileg 2019
Pengajuan Permohonan
Pengajuan Perorangan
Informasi Permohonan
Keterangan Pihak Terkait
Kunjungan Sidang
Informasi Perkara
Kuasa Hukum
Bantuan

Selasa, 16 Oktober 2018
14:44:07

List Perkara DPRD/DPRD Perselisihan Pemilihan Legislatif DPRD/DPRD Tahun 2019

Permohonan Online

#	No Perkara	Permohonan	Aksi
1	1/PAN/DPR-DPRD/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif DPR,DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019	Tanda Terima Pihak Terkait
2	2/PAN/DPR-DPRD/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif DPR,DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019	Tanda Terima Pihak Terkait
3	3/PAN/DPR-DPRD/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif DPR,DPRD Provinsi Jawa Tengah Jateng Tahun 2019	Daftar Sebagai Pihak Terkait
4	/PAN/DPR-DPRD/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif DPR,DPRD Provinsi Jawa Tengah Jateng Tahun 2019	Daftar Sebagai Pihak Terkait

Tampilan dashboard daftar sebagai pihak terkait

Keterangan Pihak Terkait Anggota DPR/DPRD Tahun 2019

SIMPEL golkar@email.com Online

Permohonan Online

Keterangan Pihak Terkait

Nomor Perkara	5/PAN/DPR-DPRD/2019
Nama Pihak Terkait	<input type="text"/>
No Urut	0
Email Pihak Terkait	<input type="text"/>
Pokok Keterangan	Keterangan pihak terkait terhadap perkara nomor 5/PAN/DPR-DPRD/2019
Kuasa Pihak Terkait	<input type="text"/>
Email Kuasa Pihak Terkait	<input type="text"/>
Tanggal Surat Kuasa	<input type="text"/>
Upload Surat Kuasa	Telusuri... Tidak ada berkas dipilih.
Upload Keterangan Pihak Terkait	Telusuri... Tidak ada berkas dipilih.
Upload Keputusan Termohon	Telusuri... Tidak ada berkas dipilih.
Upload Daftar Alat Bukti	Telusuri... Tidak ada berkas dipilih.

Simpan Permohonan

Melengkapi form keterangan pihak terkait dan mengupload/ unggah dokumen

Keterangan Pihak Terkait Anggota DPR/DPRD Tahun 2019

SIMPEL golkar@email.com Online

Dashboard Pileg 2019 Pengajuan Permohonan Pengajuan Perorangan Informasi Permohonan Keterangan Pihak Terkait Kunjungan Sidang Informasi Perkara Kuasa Hukum Bantuan

Selasa, 16 Oktober 2018
14:50:12

Tanda Terima Permohonan Online Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Dashboard Pileg 2019 Tanda Terima Keterangan Pihak Terkait

Permohonan Online

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

TANDA TERIMA KETERANGAN PIHAK TERKAIT ONLINE
Nomor Online : 3/PAN.ONLINE/TERKAIT-DPR/DPRD/2019

Nomor Perkara : 3/PAN/DPR-DPRD/2019

Nama Pihak Terkait : Adam Ghuzale

No Urut : 3


Pokok Keterangan : Keterangan pihak terkait terhadap perkara nomor 3/PAN/DPR-DPRD/2019

Kuasa Pihak Terkait : Kuasa 1

Tanggal : 16 Oktober 2018 Pukul : 14:50 WIB

Panitera
TTD
Kasianur Sidauruk

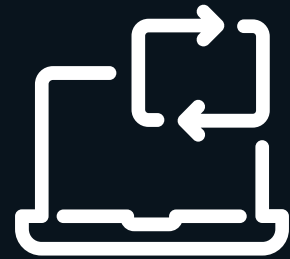
Pihak Terkait



CETAK

NO.	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA
1.	KETERANGAN PIHAK TERKAIT	ADA
2.	KEPUTUSAN TERMOHON	ADA
3.	SURAT KUASA	ADA
4.	DAFTAR ALAT BUKTI	ADA

Tanda terima keterangan pihak terkait online



4. Tracking Perkara;

Tracking Perkara

The screenshot displays the search interface of the Mahkamah Konstitusi (Constitutional Court) website. The browser address bar shows the URL <https://search.mkri.id>. The page features a search bar with the text "Cari" and a magnifying glass icon. Below the search bar, there are four tabs: "PUU", "SKLN", "PHPU", and "PHPKADA".

The main content area is divided into two columns. The left column contains filters for "Jenis dokumen" and "Jenis perkara". The "Jenis dokumen" section includes radio buttons for "Putusan" (2,937), "Ikhtisar Putusan" (245), "Risalah Persidangan" (9,283), and "Anotasi" (58). The "Jenis perkara" section includes checkboxes for "Semua jenis perkara" (6,474), "PUU" (124), "SKLN" (622), "PHPU.A" (66), "PHPU.C" (75), "PHPU.C1" (23), and "PHPU.D" (4,046). The "Amar putusan" section includes checkboxes for "Semua amar putusan" (1,275), "Ditolak" (149), and "Dikabulkan sebagian" (278).

The right column displays search results. The first result is for case 82/PUU-XVI/2018, titled "Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". The amar putusan is "MENYATAKAN PERMOHONAN PARA PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA" and the date of announcement is 26 November 2018. A "Case tracking" button is visible below the result.

The second result is for case 79/PUU-XVI/2018, titled "Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". The amar putusan is "1.MENYATAKAN PERMOHONAN PARA PEMOHON SEPANJANG BERKENAAN DENGAN PASAL 3 AYAT (1) HURUF D UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT TIDAK DAPAT DITERIMA; 2.MENOLAK PERMOHONAN PARA PEMOHON UNTUK SELAIN DAN SELEBIHNYA" and the date of announcement is 26 November 2018. A "Case tracking" button is visible below the result.

The third result is for case 78/PUU-XVI/2018, titled "Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". The amar putusan is "1.MENYATAKAN PERMOHONAN PARA PEMOHON SEPANJANG BERKENAAN DENGAN PASAL 3 AYAT (1) HURUF D UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT TIDAK DAPAT DITERIMA; 2.MENOLAK PERMOHONAN PARA PEMOHON UNTUK SELAIN DAN SELEBIHNYA" and the date of announcement is 26 November 2018. A "Case tracking" button is visible below the result.

Monitoring status perkara

Tracking Perkara

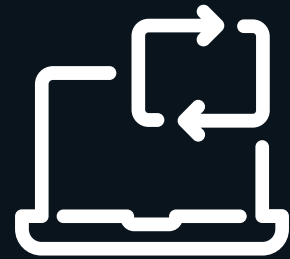
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Paniai Tahun 2018



PROSES


STEP	TANGGAL	PROSES	FILE
1	01-08-2018	Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor 72/1/PAN.MK/2018	PermohonanPermohonan AP3 dan DKPP
2	02-08-2018	Penerbitan APL dan DPKP2 dengan Nomor 71/2/PAN.MK/2018	APL dan DPKP2
3	06-08-2018	Penyerahan Perbaikan Permohonan	
4	06-08-2018	Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 71/PHP.BUP-XVI/2018, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor 71/3/PAN.MK/2018	ARPK
5	06-08-2018	Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor 283/PAN.MK/8/2018 dan Ketetapan Sidang Pertama dengan nomor 71/TAP.MK/2018	Ketetapan Sidang Pertama

Monitoring status perkara



5. Tempat Duduk Sidang;

Jadwal Sidang: Penentuan Tempat Duduk Sidang

 SIMPEL ishak.purnama4@gmail.com

Kunjungan Sidang Jadwal Sidang Dashboard > > Kunjungan Sidang > > Jadwal Sidang

[Jadwal Sidang Pemohon](#)

#	WAKTU SIDANG	NOMOR PERKARA	ACARA SIDANG	KEHADIRAN
1	2018-09-26, 13:30 WIB	61/PHP.BUP-XVI/2018	Pengucapan Putusan	Kehadiran

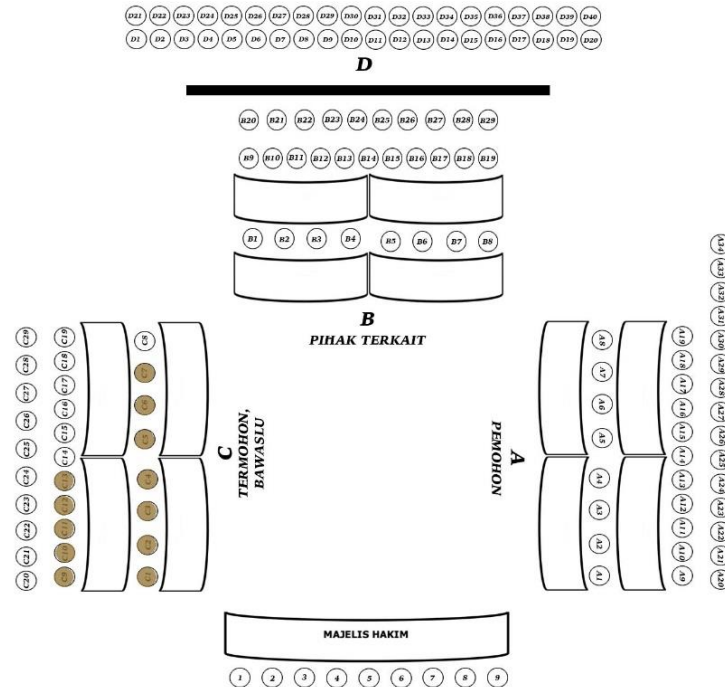
Kamis, 4 Oktober 2018
14:06:58

List jadwal sidang untuk menentukan tempat duduk sidang

Penentuan Tempat Duduk Sidang

Jadwal Sidang

Nomor Perkara	Acara Sidang	Tanggal Ketetapan Hari Sidang	Tanggal Sidang	Waktu Sidang	Lokasi
61/PHP.BUP-XVI/2018	Pengucapan Putusan		26-09-2018	13:30	PANEL 3



Denah ruang sidang



6. **Pelayanan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*);**

Pelayanan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*)

Dalam rangka penyelenggaraan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan antara lain dengan melaksanakan persidangan jarak jauh, yaitu:

- a. mempermudah masyarakat pencari keadilan dan stakeholder mengikuti proses persidangan dalam arti tidak selalu harus hadir secara fisik ke ruang sidang MK,
- b. menekan biaya persidangan bagi masyarakat pencari keadilan dalam arti biaya yang akan ditanggung oleh masyarakat pencari keadilan cukup ringan.

PMK 18/2009 Pasal 16 ayat (3)

“Pemeriksaan persidangan jarak jauh adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap pemohon dan/atau termohon maupun kuasanya, saksi dan/atau ahli yang dilakukan secara online dan real time (seketika) dari jarak jauh melalui teknologi video conferencing dengan menggunakan telepon dan koneksi jaringan, sehingga memungkinkan masing-masing untuk saling melihat dan berbicara sebagaimana dalam persidangan secara offline.”

Pelayanan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*)

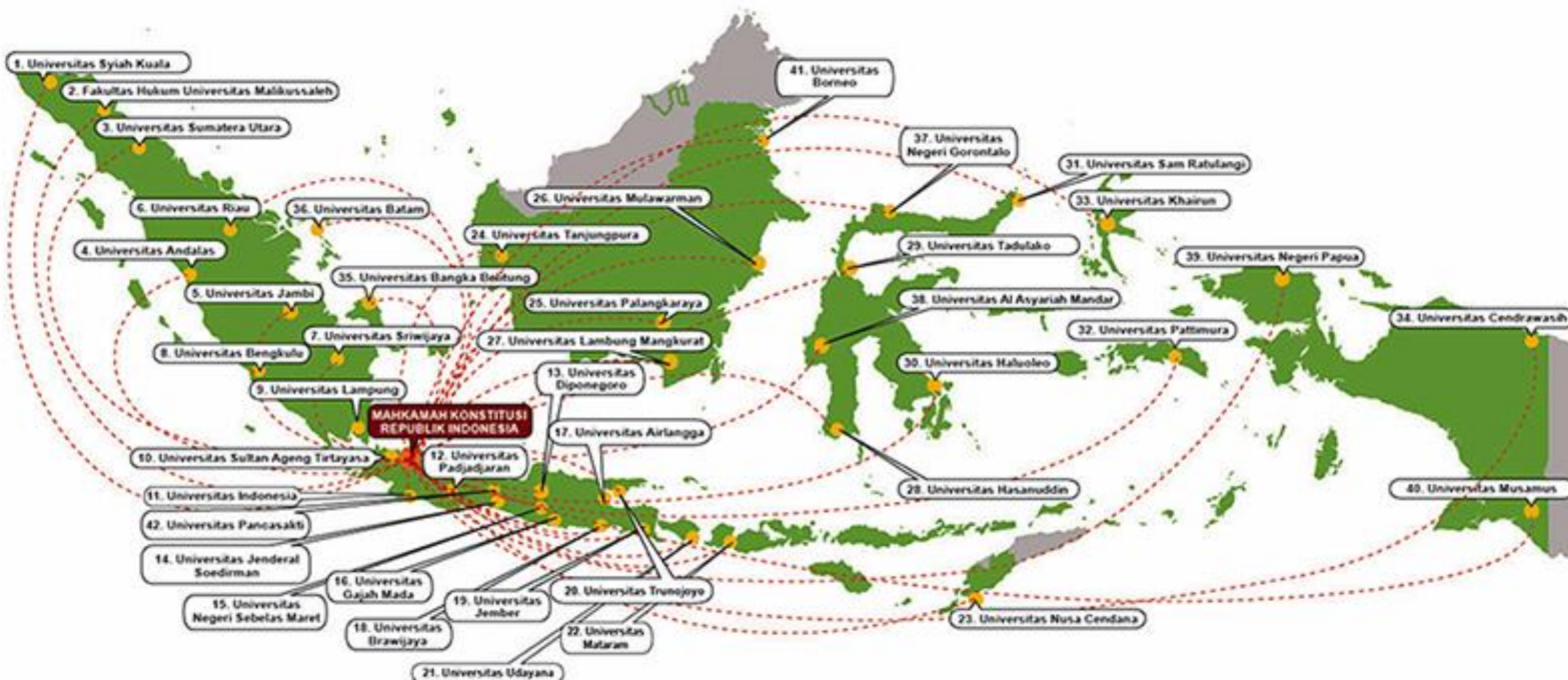
NO	PERGURUAN TINGGI	ALAMAT	NO	PERGURUAN TINGGI	ALAMAT
1	FH Universitas Syiah Kuala	Jl.T. Putroe Phang Kopelma Darussalam Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam	12	FH Universitas Padjadjaran	Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung , Jawa Barat 40132
2	FH Universitas Malikussaleh (Provinsi Aceh)	Kampus Bukit Indah, Kota Lhokseumawe P.O.BOX 141	13	FH Universitas Diponegoro (Jawa Tengah)	Jl. Prof. H. Soedarto, S.H. Kampus Universitas Diponegoro Tembalang, Semarang 50214
3	FH Universitas Sumatera Utara	Jl. Universitas No.4 Padang Bulan, Kampus USU, Medan Sumatera Utara 20155	14	FH Universitas Jenderal Soedirman	Jalan Prof.Dr.HR. Boenjamin 708, Grendeng - Purwokerto 53122
4	FH Universitas Andalas	Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang 25163 Sumatera Barat	15	FH Universitas Sebelas Maret	Jl. Ir. Sutami N0.36 A, Kertingan, Surakarta, Jawa Tengah 57126
5	FH Universitas Jambi (Kampus Pinang Masak)	Jl. Raya Jambi-Muara Bulian KM 15 Mendalo Darat-Jambi, 363631	16	FH Universitas Gadjah Mada	Kampus UGM, Jl. Sosio Yustitia, Bulaksumur 55281 Yogyakarta
6	FH Universitas Riau	Jalan Pattimura No. 9 Gobah Pekanbaru Riau	17	FH Universitas Airlangga	Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Jawa Timur
7	FH Universitas Sriwijaya (Sumatera Selatan)	Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km.32 Inderalaya Ogan Ilir30661	18	FH Universitas Brawijaya	Jl. Mayjen M.T Haryono No.169, Malang 65145 Jawa Timur
8	FH Universitas Bengkulu	Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 A	19	FH Universitas Jember	Jl. Kalimantan 37, Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121 Jawa Timur
9	FH Universitas Lampung	Jl. Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No.1, Gedung Meneng, Bandar Lampung 35145	20	FH Universitas Trunojoyo	Jl. Raya Telang P.O.Box 2 Kamal, Bangkalan-Madura
10	FH Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Jl. Raya Jakarta Km.4 Pakupatan, Serang Banten	21	FH Universitas Udayana	Jl. Pulau Bali No.1, Denpasar 80114 Bali
11	FH Universitas Indonesia	Kampus Baru UI, Depok 16424 Jawa Barat	22	FH Universitas Mataram	Jalan Majapahit No.62, Mataram 83125 Nusa Tenggara Barat

Pelayanan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*)

PERGURUAN TINGGI		ALAMAT	NO	PERGURUAN TINGGI	ALAMAT
23	FH Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur	33	FH Universitas Khairun (Ternate)	Kampus II Kelurahan Gambesi, Jl. Raya Pertamina KotaK Pos 53 Ternate 97719
24	FH Universitas Tanjungpura	Jl. Jenderal Achmad Yani/Jl. Sosiologi Pontianak Kotak Pos 1049 Kalimantan Barat	34	FH Universitas Cenderawasih	Jl. Kamp Wolker Kampus Baru Waena - Jayapura - Papua 99358
25	FH Universitas Palangka Raya	Kampus UNPAR Tunjung Nyaho Jl. H. Timang Kotak Pos 2/PLKUP Palangkaraya Kalimantan Tengah	35	FH Universitas Bangka Belitung	Kampus Terpadu, Balunijuk, Merawang-Bangka, Kepulauan Bangka Belitung
26	FH Universitas Mulawarman	Jl. Sambaliung Kampus Gunung kelua, Samarinda Kalimantan Timur 75119	36	FH Universitas Batam	Jl. Abulyatama no 5 Batam Center
27	FH Universitas Lambung Mangkurat (Kalimantan Selatan)	Jl. Brigjend H. Hasan Basry (Kayu Tangi) Banjarmasin, 70123	37	FH Universitas Negeri Gorontalo	Jl. Jend. Sudirman No.6 Kota Gorontalo
28	FH Universitas Hasanudin (Sulawesi Selatan)	Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Kampus Tamalanrea, Makasar 90245	38	Universitas Al Asyariah Mandar	Jl. Budi Utomo No.2 Manding, Polewali, Provinsi Sulawesi Barat, 91315
29	FH Universitas Tadulako	Kampus Bumi Tadulako Tondo, Jl. Soekarno Hatta KM.9, Palu Sulawesi Tengah - 94118	39	Universitas Negeri Papua	Jl. Gunung Salju Manokwari, Papua Barat 98314
30	FH Universitas Haluleo (Sulawesi Tenggara)	Kampus Hijau Bumi Tridharma Jl. H.E.A Mokodompit Anduonohu Kendari 93232	40	FISIP Universitas Musamus	Jl. Kamizaun Mopah Lama Merauke
31	FH Universitas Sam Ratulangi	Kampus UNSRAT Bahu, Manado Sulawesi Utara 95115	41	FH Universitas Borneo	Jl. Amal Lama No 1, Tarakan Kalimantan Utara PO. BOX 170
32	FH Universitas Patimura	Jln. Ir. M. Putuhena Kampus Unpatti Poka - Ambon	42	FH Universitas Pancasakti	Jl. Halmahera KM.1 - Kota Tegal, Jawa Tengah

Pelayanan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*)

LOKASI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI DI PERGURUAN TINGGI SELURUH INDONESIA



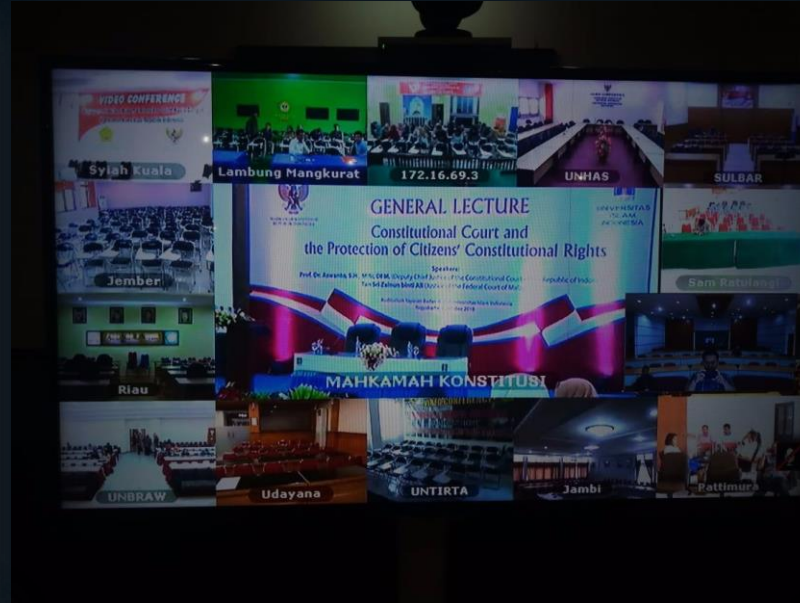
Pelayanan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*)



Persidangan Jarak Jauh Pengujian UU Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan

6 Agustus 2018

Pemanfaatan lain dari fasilitas *Video Conference*



Kuliah Umum /
General Lecture
dan Symposium
Nasional /
International



**TERIMA
KASIH**